

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

(1)	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan	Ada	Bagian Hukum
2			Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah <u>rumah</u> seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2021, sebanyak 1.536 unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2021, sebanyak 3.621 Unit (Kec. Suliki)	47.23 %	Data dari tahun 2002	
3			Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	ADA: Dokumen RTRW 2011 -2030 sudah dalam proses penetapan	Ada		
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan KTP	Lama pengurusan KTP dalam PERDA	Dasar hukum: PERDA Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Restribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	%	Bagian Capil
5			Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum: PERDA Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Terpadu	Rp. 0/ Tidak Dipungut Biaya	Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP. Bagian Capil	
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2021 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2021 sebanyak = - orang Penduduk pada akhir tahun 2021 , berjumlah 15.182 orang	%	Kantor Satpol PP dan Dinas Kependudukan dan Capil

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	ADA: PERDA Nomor : 5 Tahun 2009 tentang ketentraman dan ketertiban (yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)	Ada	Bagian Hukum Dan Satpol PP
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	ADA: PERDA Nomor :11 Tahun 2003 tentang pengelolaan lingkungan	Ada	Badan Lingkungan Hidup
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2011,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2021 disampaikan pada tanggal 23 Januari 2021 sesuai surat pengantar Nomor : 11/K-KPE/I-2021	Tepat Waktu	Bapelitbang
Penyampaian laporan kepada pemerintah		10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2021, disampaikan pada Departemen Keuangan tanggal 04 Februari 2022 sesuai surat pengantar Nomor : 6/LKD-C-Sli/2022	Tepat waktu	BK	
		11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Laporan Kinerja tahun 2021 disampaikan pada tanggal 2 Februari 2022 sesuai surat pengantar Nomor : 8/LK-C-Sli/2022.	Tepat waktu	BK	
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)		12	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan penetapan oleh menteri/ Pimpinan LPND	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 23 urusan, yang terdiri dari :	23 Urusan	Bapelitbang	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		Hubungan antar daerah	13	Frekuensi kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2017	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2020, sebanyak 0 1. No dan tgl 0MOU	Bagian kerjasama antar daerah
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u>	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 6 program. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas-	55 %	Bapelitbang
Kewenangan		15	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2021 (APBD) = 23 urusan.	100 %	Bapelitbang	
Keuangan		16	Waktu penetapan PERDA APBD 2020	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2020	Tanggal 27 Januari 2021	Tepat waktu	BK	
		17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	PERDA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Ada	BK	
18	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2021. 1) Urusan Pendidikan Rp. - 2) Urusan Kesehatan Rp. - 3) Urusan Lingkungan Hidup Rp. - 4) Urusan PU Rp. - 5) Urusan Sosial Rp. - 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. - 7) Urusan Koperasi Rp. - 8) Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Rp. - 9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. - Total Belanja pelayanan dasar Rp. -	%	BK			

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
					Total Belanja langsung APBD 2021, sebesar Rp. 331.963.532		
		19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Total Belanja Urusan Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2020 1) Urusan Pendidikan Rp. - 2) Urusan Kesehatan Rp. - Total Belanja Pend & Kes Rp. -	%	BK
	Pelayanan Publik	20	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	ADA: 1. Perda No. 1/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan 2. Perda No. 15/1996 tentang izin tempat usaha dan izin UU gangguan 3. Perda No. 7/2002 tentang izin usaha pertanian dan retribusi hasil usaha kerjasama operasional penangkaran benih komoditi pertanian serta pendayagunaan jasa alat mesin pertanian milik pemerintah daerah 4. Perda 14/2003 tentang izin usaha dan tanda daftar usaha serta retribusi usaha agroindustri pertanian tanaman pangan 5. Perda No.7/2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan 6. Perbub No.16/2000 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten 7. Perbub No. 39 /2011 tentang pedoman pembentukan dan pendaftaran organisasi kemasyarakatan 8. Perbub No.31/2011 tentang penyelenggaraan JAMKESMAS Kabupaten Lima Puluh Kota	5 perda dan 3 Perbub	Bagian Hukum
	Kepegawaian	21	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Kec. Suliki tahun 2021 sebanyak 12 orang dan sekretaris nagari 4 orang. Jumlah penduduk Kab. Lima Puluh Kota tahun 2021 sebanyak - orang-	%	BKD
		22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Sistem database: Data Bezeting PNS DUK Data Nominatif (tentang kepegawaian)	Ada	Badan Kepegawaian Daerah

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		Kelembagaan	23	Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah OPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = 10 unit 2) Dinas = 17 unit 3) Badan = 5 unit 4) Kantor = 0 unit 5) Rumah Sakit = 1 unit 6) Lembaga Teknis lainnya = 7 unit 7) Kecamatan/Distrik = 13 unit Jumlah OPD = 43 unit	43 unit	Kab. Lima Puluh Kota
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	Jumlah PERDA tahun 2017	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2017	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2021, sebanyakPerda (Daftar terlampir)	100%	Bagian Hukum
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	25	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2017	- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2021, sebanyak - - RAPERDA yang diusulkan tahun 2021, sebanyak	%	Bagian Hukum dan Setwan
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2016x 100%	- keputusan DPRD yang tidak lanjut oleh DPRD dalam tahun 2021, sebanyak.....keputusan - keputusan DPRD dalam tahun 2021, sebanyak keputusan		Setwan
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjuti keputusan Bupati	27	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2016 x 100%	- Keputusan Bupati tahun 2021 sebanyakkeputusan - Keputusan Bupati tahun 2021 yang ditindaklanjuti sebanyak keputusan	100%	Bagian Hukum
		Tindaklanjuti Peraturan Bupati	28	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2016 x 100%	- Peraturan Bupati dalam tahun 2021 yang ditindaklanjuti sebanyak.....Perbup - Peraturan Bupati tahun 2021 sebanyak..... Perbup	100%	Bagian Hukum Lembaran Daerah

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 , yang terdiri dari: Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ...	0 %	Bagian Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	PERDA Nomor.104 TAHUN 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dengan Media Cetak, Elektronik dan Media Luar Ruang	Ada	Bagian Hukum
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	Apabila ADA, - Website : limapuluhkota.go.id - Tabloid Sinamar	Ada	Bagian Humas dan Protokoler
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2021 sebesar Rp.- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2021 sebesar Rp. -	%	Kec. Suliki
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	Belanja langsung APBD tahun 2021, sebesar Rp. 331.963.532,- - DAU Tahun 2021, sebesar Rp.-	92,23%	Kec. Suliki
		Alokasi Belanja pada APBD	34	Belanja Publik terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	Total Belanja langsung APBD tahun 2021, sebesar Rp .331.963.532,- - Total Belanja APBD Tahun 2021, sebesar Rp.1.666.120.650,-	96.26 %	Kec. Suliki
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2021, sebesar Rp 0,- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2021, sebesar Rp.0,-	0 %	Kec. Suliki
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN,	Kewajaran Laporan	36	Opini BPK terhadap	Jenis opini BPK terhadap	- Opini BPK atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2021,	%	Opini,:

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Keuangan (Lapkeu)		LapKeu Daerah	Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	dengan opini: WTP - Opini BPK atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2021, dengan opini: WDP		1) WTP/ <i>unqualified opinion</i>); 2) WDP/ <i>qualified opinion</i>); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>). Opini LHP Tahun 2011, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2021, sebesar Rp 62.327.765,- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2021, sebesar Rp. 0,-	8.32%	Kec. Suliki
		Realisasi belanja	38	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja L Tahun 2021, sebesar Rp 331.963.532 - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2021, sebesar Rp. 1.666.120.650,-	98.35 %	Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA. (Kec.Suliki)
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	39	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011	- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak 0 temuan. - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2021, sebanyak 0 temuan.	0%	Kec. Suliki
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Realisasi PAD 2016 terhadap <u>potensi PAD</u>	Jumlah realisasi PAD 2016 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2021, sebesar Rp.0,- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2021 APBD Rp. 0,-	0 %	Kec. Suliki
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	(PAD 2016- PAD 2013) : PAD 2016 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2021 sebesar Rp.0,- - Total Realisasi PAD pada Tahun 2021 sebesar Rp.0,-	0 %	Kec. Suliki

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Kec. Suliki dalam tahun 2020	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Kec. Suliki dalam Tahun 2021	Penghargaan yang diterima, sebanyak yang terdiri dari 1)	Penghargaan	Kec. Suliki
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak ada implementasi E-Procurement	Ada tidak ada PERDA tentang implementasi E-Procurement	Tidak Ada	Kec. Suliki
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2021	Persetujuan izin investasi pada tahun 2021, sebanyak 0 izin		Kec. Suliki

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

KABUPATEN : LIMA PULUH KOTA
 NAMA SKPD : KECAMATAN SULIKI
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

(1)	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja 2021	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	E-KTP	100%	Sekretariat Kecamatan
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak ada	0%	Sekretariat Kecamatan
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Tidak ada	0%	Sekretariat Kecamatan
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 jabatan	100%	Sekretariat Kecamatan
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak ada	Tidak ada	Sekretariat Kecamatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 15 personil - Total PNS kabupaten sebanyak ---- personil	100%	Sekretariat Kecamatan
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai bidang tugasnya	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim sebanyak 5 orang	100%	Sekretariat Kecamatan
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada sebanyak 9 jabatan	100%	Sekretariat Kecamatan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja 2021	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2021, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2021-2026 2. Renja 2021 3. RKA /RKPA 2021	3 jenis dokumen	Sekretariat kecamatan
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD 100%	Tidak ada	0%	Sekretariat kecamatan
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 6 program - Program dalam RKA SKPD sebanyak 6 program	100%	Sekretariat kecamatan
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 6 program - Program dalam RKA SKPD sebanyak 6 program	100%	Sekretariat kecamatan
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran OPD sebesar Rp. 1.666.120.650,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp 0,-	98.35%	Sekretariat kecamatan
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja OPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 1.666.120.650,-	99,29%	Sekretariat kecamatan
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp.0,- - Total belanja barang dan jasa OPD, sebesar Rp. 331.963.532,-	95.46%	Sekretariat kecamatan
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100%	- total belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 0,- - Total belanja OPD, sebesar Rp. 1.666.120.650,-	98.35%	Sekretariat kecamatan
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan, BKU, Neraca	100%	Sekretariat kecamatan
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Daftar barang atau asset OPD yang aktif	Ada	Sekretariat kecamatan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja 2021	KETERANGAN
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100 %	Daftar aset yang dikuasai OPD di luar aset tanah	0%	Sekretariat kecamatan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas /prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman	1 buah	Sekretariat kecamatan
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak ada	0%	Sekretariat kecamatan

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

KABUPATEN : LIMA PULUH KOTA
 NAMA OPD : KECAMATAN SULIKI
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja 2021		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program (E-KTP) - Jumlah program nasional yang dilaksanakan OPD sebanyak 1 program	- Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program (Musrenbang) - Jumlah program nasional yang dilaksanakan OPD sebanyak 1 program	100%	100%	Sekretariat Kecamatan
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0%	0%	Sekretariat Kecamatan
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Tidak ada	Tidak ada	0%		Sekretariat Kecamatan
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 jabatan - Jabatan yang ada sebanyak 9 jabatan	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 jabatan - Jabatan yang ada sebanyak 9 jabatan	100%	100%	Sekretariat Kecamatan
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		Sekretariat Kecamatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) OPD sebanyak 2 personil - Total PNS kabupaten sebanyak ---- personil	- PNS yang menangani urusan (2) OPD sebanyak 2 personil - Total PNS kabupaten sebanyak ---- personil	100%	100%	Sekretariat Kecamatan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja 2021		KETERANGAN
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai bidang tugasnya	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim sebanyak - 5 orang	Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim sebanyak -5 orang	100%		Sekretariat Kecamatan
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 5 orang - Jabatan yang ada sebanyak 9 jabatan	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 5 orang - Jabatan yang ada sebanyak 9 jabatan	100%		Sekretariat Kecamatan
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2021, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2021-2026 2. Renja 2021 3. RKA /DPA/RKPA	Ada. Dokumen yang ada tahun 2020, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2021-2026 2. Renja 2021 3. RKA /DPA/RKPA	3 jenis dokumen		Sekretariat kecamatan
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD 100%	Tidak ada	Tidak ada	0%		Sekretariat kecamatan
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD sebanyak 6 program - Program dalam RKA OPD sebanyak 6 program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD sebanyak 6 program - Program dalam RKA OPD sebanyak 6 program	100%		Sekretariat kecamatan
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD sebanyak 6 program - Program dalam DPA OPD sebanyak 6 program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD sebanyak 7 program - Program dalam DPA OPD sebanyak 6 program	100%		Sekretariat kecamatan
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran OPD sebesar Rp, 1.666.120.650,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp....	- Total Anggaran OPD sebesar Rp, 1.666.120.650,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp	%		Sekretariat kecamatan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja 2021		KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja OPD	Belanja modal dibagi total belanja OPD x 100%	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp. 17.500.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 1.666.120.650,-	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp.17.500.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 1.666.120.650,-	%		Sekretariat kecamatan
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa OPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp.70.860.000,- - Total belanja barang dan jasa OPD, sebesar Rp.314.463.532,-	- Total belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp.70.860.000,- - Total belanja barang dan jasa OPD, sebesar Rp.314.463.532,-	0%		Sekretariat kecamatan
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100%	- total belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 70.860.000,- - Total belanja OPD, sebesar Rp. 1.666.120.650,-	- total belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp.70.860.000,- - Total belanja OPD, sebesar Rp. 1.666.120.650,-	0%		Sekretariat kecamatan
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan, BKU, Neraca	Laporan keuangan, BKU, Neraca	100%		Sekretariat kecamatan
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Daftar barang atau asset OPD yang aktif	Daftar barang atau asset OPD yang aktif	Ada		Sekretariat kecamatan
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100 %	Daftar aset yang dikuasai OPD di luar aset tanah	Daftar aset yang dikuasai OPD di luar aset tanah	0%		Sekretariat kecamatan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas /prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	1 buah		Sekretariat kecamatan
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	0%		Sekretariat kecamatan

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA 2019	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
20	Otonomi Daerah	64	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs.	1 buah	Papan pengumuman
		65	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya IKM di pemda.	Tidak ada	-

**DATA JUMLAH RUMAH TANGGA, JUMLAH RUMAH, JUMLAH RUMAH BER- IMB TAHUN 2021
KECAMATAN SULIKI**

No	Nagari	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Rumah s/d Akhir Tahun 2021	Jumlah Rumah Ber- IMB s/d Akhir Tahun 2021
1	LIMBANANG	1417	1381	23
2	SULIKI	860	899	12
3	ANDIANG	789	700	9
4	KURAI	612	587	7
5	SUNGAI RIMBANG	700	658	14
6	TANJUANG BUNGO	465	450	13
JUMLAH		4843	4675	78

Suliki, 11 Januari 2022

CAMAT



ALI SABRI S.Sos

NIP.19651105 198703 1 007

INDIKATOR KINERJA KUNCI III.2. ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN

No	IKK	Elemen Data	Satuan elemen data	NILAI CAPAIAN	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program nasional yang dilaksanakan OPD	Program	1	FC DPA OPD : halaman muka (cover), halaman halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya DPA tsb
		Jumlah program nasional (RKP)	Program		TIM LPPD
2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Jumlah SOP	SOP	1	FC SOP OPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tsb
		SOP Pelayanan Publik	Jenis SOP	1	
		SOP #2	Jenis SOP		
		SOP #3	Jenis SOP		
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		Photocopy PERDA/ PERBUP tindakan lanjut pelaksanaan PERMEN : halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda/perbub pelaksanaan dari permen tsb
		Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	-	Daftar rincian yang menunjukkan Permen yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani
4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	9	FC struktur organisasi OPD
		Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	9	
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	-	Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di OPD pada bidang yang menangani urusan terkait
		1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional	-	
		2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fungsional	-	

6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD	orang	15	FC daftar pegawai/ Bezeeting OPD
		Jumlah PNS Kabupaten	orang	-	
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang sudah ikut Diklatpim	orang	4	
		Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	9	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan Diklat PIM
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	10	
		Jumlah pejabat OPD yang ada	orang	9	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait
9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
	-RENSTRA-OPD	-RENSTRA-OPD 2021-2026	ada	1	FC RENSTRA OPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RENSTRA tsb
	-RENJA-OPD	-RENJA-OPD 2021	ada	1	FC RENJA OPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RENJA tsb
	-RKA-OPD	-RKA-OPD 2021	ada	1	FC RKA SKPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RKA tsb
10	Jumlah Program OPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD	Program	7	FC RENJA SKPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RENJA tsb
		Jumlah program RENJA OPD	Program	7	
11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Program	7	FC RKA SKPD : halaman muka (cover), halaman halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RKA tsb
		Jumlah Program dalam RKA OPD	Program	7	
12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Program	7	FC DPA SKPD : halaman muka (cover), halaman halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya DPA tsb
		Jumlah program dalam DPA OPD	Program	7	

13	Anggaran OPD terhadap total anggaran belanja APBD	Total anggaran OPD	Rp	1.666.120.650	FC Laporan Keuangan SKPD tahun 2020
		Total anggaran belanja OPD	Rp	1.666.120.650	
14	Belanja modal terhadap total belanja OPD	Realisasi Belanja Modal OPD	Rp	16.993.000	
		Realisasi Belanja OPD	Rp	1.603.792.884	
15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Realisasi Belanja Pemeliharaan OPD	Rp	69.735.549	
		Realisasi Belanja Barang dan Jasa OPD	Rp	290.033.476	
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD	Realisasi Belanja Pemeliharaan OPD	Rp	69.735.549	FC Laporan Keuangan SKPD tahun 2020 yang menunjukkan halaman Neraca, LRA dan CaLK
		Realisasi Belanja OPD	Rp	1.603.792.884	
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	
	- Neraca	- Neraca	ada/tidak	ada	
	- LRA	- LRA	ada/tidak	ada	
	- CALK	- CALK	ada/tidak	ada	
18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	FC berita acara pelaksanaan inventarisasi barang/ asset SKPD
19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah aset yang tidak digunakan OPD	Rp	-	FC Daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset yang tidak digunakan
		Total Asset yang dikuasai OPD	Rp	-	FC Daftar rincian yang menunjukkan total aset yang dikuasai OPD
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	
	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	Foto Bukti Fisik
	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Tidak ada	Print out foto
	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak	Tidak ada	FC Leaflet
	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak ada	Daftar Inventaris
	5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak ada	Print out foto
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak ada	FC cover laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait

INDIKATOR KINERJA KUNCI III.2 ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN

KABUPATEN : LIMA PULUH KOTA
 NAMA SKPD : KECAMATAN SULIKI

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN ELEMEN	NILAI CAPAIAN	KETERANGAN
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	E-KTP	100%	Sekretariat Kecamatan
	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah SOP 1 (satu) buah	Standar Operasional Pelayanan Terpadu	100%	Sekretariat Kecamatan
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Tidak ada	0%	Sekretariat Kecamatan
	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	- Jabatan yang ada sebanyak 9 jabatan jumlah jabatan yang ada x 100% - Jabatan yang harus ada sebanyak 9 jabatan	Ada	100%	Sekretariat Kecamatan
	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Tidak ada	0%	Sekretariat Kecamatan
4	Rasio PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 15 personil	15 Orang	100%	Sekretariat Kecamatan
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai bidang tugasnya	Pejabat yang memenuhi syarat Diklat sebanyak 2 orang	2 Orang	35%	Sekretariat Kecamatan
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada sebanyak 9 jabatan	9 Orang	100%	Sekretariat Kecamatan
5	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA - OPD -RENJA - OPD -RKA-OPD	Dokumen yang ada tahun 2021, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2021-2026 2. Renja 2021 3. RKA /DPA/DPPA 2021	3 Jenis Dokumen	100%	Sekretariat kecamatan
	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD 100%	Tidak ada	0%	Sekretariat kecamatan
	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD sebanyak 7 program - Program dalam RKA OPD sebanyak 7 program	7 Program	100%	Sekretariat kecamatan

NO	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN ELEMEN	NILAI CAPAIAN	KETERANGAN
	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA- OPD	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD sebanyak 6 program - Program dalam DPA OPD sebanyak 6 program	7 program	100%	Sekretariat kecamatan
6	Anggaran Belanja OPD terhadap total belanja APBD	- Total Anggaran OPD sebesar Rp 1.666.120.650,- - Total Realisasi Belanja OPD, sebesar Rp 1.603.792.884-	- Rp.1.666.120.650,- - Rp 1.603.792.884-	96.26%	Sekretariat kecamatan
	Belanja modal terhadap total belanja OPD	- Realisasi Belanja Modal OPD, sebesar Rp.16.993.000,- - Realisasi Belanja OPD, sebesar Rp. 1.603.792.884-	- Rp. 16.993.000,- - Rp.1.603.792.884-	98.35%	Sekretariat kecamatan
	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	- Realisasi belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp.69.735.549,- - Realisasi belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 69.735.549,-	- Rp.69.735.549,- - Rp.69.735.549,-	100%	Sekretariat kecamatan
	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD	- Realisasi belanja barang dan jasa OPD, sebesar Rp.290.033.476,- - Realisasi belanja OPD, sebesar Rp 1.603.792.884-	- Rp. 290.033.476,- - Rp 1.603.792.884-	97%	Sekretariat kecamatan
	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, Calk)	Laporan keuangan, BKU, Neraca	Ada	100%	Sekretariat kecamatan
7	Keberadaan inventarisasi barang atau asset OPD	Daftar barang atau asset OPD yang aktif	Ada	100%	Sekretariat kecamatan
	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Daftar aset yang dikuasai OPD di luar aset tanah	Tidak ada	0%	Sekretariat kecamatan
8	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	1. Papan Pengumuman	1 Buah	%	Sekretariat kecamatan
	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak ada	0%	Sekretariat kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SULIKI

Jl. Tan Malaka No. 49 Suliki Kode Pos 26255

SURAT PERNYATAAN

Nomor : /SP/C-Sli/2021

Saya yang bertanda di bawah ini :

Nama : ALI SABRI,S.Sos
NIP : 19651105 198703 1 007
Jabatan : Camat Kecamatan Suliki.
Alamat : Nagari Suliki Kecamatan Suliki.

Dengan ini menyatakan bahwa jumlah asset baik yang tidak digunakan di Kecamatan Suliki pada tahun 2021 adalah **NIHIL**.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Suliki, 11 Januari 2021

CAMAT SULIKI

ALI SABRI,S.Sos

Pembina / NIP.19651105 198703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SULIKI

Jl. Tan Malaka No. 49 Suliki Kode Pos 26255

SURAT PERNYATAAN

Nomor : /SP/C-Sli/2021

Saya yang bertanda di bawah ini :

Nama : ALI SABRI,S.Sos
NIP : 19651105 198703 1 007
Jabatan : Camat Kecamatan Suliki.
Alamat : Nagari Suliki Kecamatan Suliki.
.

Dengan ini menyatakan bahwa pada tahun 2021 Kecamatan Suliki sudah melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil survey masyarakat puas dengan pelayanan Paten yang ada di kecamatan Suliki.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Suliki, 11 Januari 2021

CAMAT SULIKI

ALI SABRI,S.Sos

Pembina / NIP.19651105 198703 1 007